

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi ini, pemerintah yang ada disetiap negara baik neraga maju maupun berkembang, dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas yang semakin baik atau yang sering disebut dengan *good governance*, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. *Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kejujuran (*fairness*), sehingga sumber daya yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat.

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat diperlukan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, dapat terselenggarakan secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada masyarakat /publik. Salah satu contoh terjadinya pelimpahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat, kini dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset negara.

Dalam rangka mendukung pelimpahan kewenangan proses pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007, dan yang telah diubah dengan peraturan terbaru yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan ini menuntut suatu perubahan mendasar dibidang pengelolaan dan pertanggungjawaban barang milik daerah dan telah memunculkan optimisme baru dalam pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya dengan mengedepankan prinsip *good governance*.

Pengelolaan aset daerah dalam bentuk laporan barang milik daerah yang akurat, akuntabel dan transparan diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan para pengguna anggaran dalam mengambil kebijakan dalam mengendalikan, mengawasi dan mengelola aset yang terdapat pada instansi masing-masing, selain itu juga turut serta berkontribusi untuk pembuatan neraca keuangan pemerintah daerah, yaitu pada akun aset lancar dan akun aset tetap. Laporan keuangan berupa neraca tersebut perlu diperhatikan karena laporan keuangan bukan hanya sebagai suatu kewajiban belaka namun lebih menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran dan pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang merupakan

tanggungjawab pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk itu pemerintah daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengawasan terhadap keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan baik pengawasan internal maupun eksternal, dalam hal ini pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan oleh BPK akan ditindaklanjuti dengan pemberian opini, oleh sebab itu untuk mendapatkan opini yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pengelolaan barang milik daerah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan harus dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dalam pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah bisa terjadi dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan maupun dalam penyusunan laporan keuangan, etika para pegawai dalam menerapkan kepatuhan terhadap kode etik pegawai menjadi suatu permasalahan dalam mengelola barang milik daerah.

Etika sangat diperlukan karena akan mempengaruhi hasil pekerjaan tersebut. Aparatur pemerintah pada dasarnya adalah pelayan publik. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah aparatur telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika

yang salah satunya adalah memberikan transparansi, jujur dan akuntabel dalam sebuah pelaporan, baik pelaporan barang milik daerah maupun pelaporan keuangan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pengalaman ialah sesuatu yang pernah dialami (djalani, dirasai, ditanggung dan sebagainya) bisa berupa peristiwa yang baik maupun yang buruk (KBBI, 2005). Pengalaman merupakan guru terbaik, pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, atau pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam pekerjaannya. Pengalaman pegawai dalam mengelola barang milik daerah akan ikut mematangkan pegawai yang bersangkutan dalam menghadapi masalah-masalahnya, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan.

Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dalam membuat laporan keuangan, maupun dalam mengelola barang milik daerah sebagai bagian yang terintegrasi dengan laporan keuangan sehingga sangat dibutuhkan pegawai untuk mempunyai kompetensi dimana kualitas individu tersebut akan menghasilkan kesuksesan dalam pekerjaannya.

Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi belum pernah sekalipun menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) akibat tidak memadainya pengelolaan barang milik daerah sehingga terdapat beberapa hal yang dikecualikan (belum diyakini kewajaran pelaporannya).

Berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014-2016 meskipun sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, pengelolaan barang milik daerah termasuk didalamnya penatausahaan barang milik daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bekasi dilaporkan masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan dengan rincian barang milik daerah yang tidak ditemukan keberadaannya, tanpa keterangan ataupun identitas yang lengkap, terdapat tanah sebagai bagian dari barang milik daerah yang belum bersertifikat, barang milik daerah yang dicatat dan dilaporkan dalam bentuk paket sehingga masih belum dapat diyakini sepenuhnya atas kewajaran nilai penyusutannya, serta permasalahan lainnya.

Dari uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi"**

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah etika dalam mengelola barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi?
2. Apakah kompetensi dalam mengelola barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi?
3. Apakah pengalaman dalam mengelola barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi?
4. Apakah etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh etika dalam mengelola barang milik daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dalam mengelola barang milik daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman dalam mengelola barang milik daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

4. Untuk mengetahui pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini semoga memberikan kegunaan ke beberapa pihak diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pengaruh dalam mengelola barang milik daerah yang meliputi etika, kompetensi dan pengalaman terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk menambah wawasan terkait pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak penulis peroleh di bangku kuliah.

- b) Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik

melakukan penelitian yang sama, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut yaitu dalam bidang pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

c) Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Bagi pihak pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik daerah.

d) Bagi pihak fakultas / akademisi

Bagi pihak akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam bidang keuangan pemerintah daerah/ akuntansi sektor publik.